KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

7UNDVXQF

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 FINAL/TIDAK FINAL

1721-B1

			=					
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		H.1 NOMOR : 2 0 0 0 0 1 0 9 3			H.4 X Final			
		H.2 X Pembetulan Ke- 0 H.3 Pembatalan			н.5	Tidak Final		
A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG								
A.1 NPWP : 68 807 564 7 722 000								
A.2 NIK :								
A.3 Nama : NURLIAH								
B. PPh PASAL 21 YANG DIPOTONG								
MASA PAJAK (mm-yyyy)		JAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp)	TARIF LEBIH TINGGI 20% (TIDAK BER- NPWP)	TARIF (%)	PPh DIPOTONG/DTP (Rp)	
B.1	B.2		B.3	B.4	B.5	B.6	B.7	
3	21-402-01		912.500	912.500	0	5	45.625	
Keterangan Kode Objek Pajak : Honor dan Imbalan Lain yang Dibebankan kepada APBN atau APBD yang Diterima oleh PNS, Anggota								
B.8 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen 026/SP2D-GU/BLUD-RSJDAHM/III/2022								
Nama Dokumen Biaya Pembayaran Tanggal 1 6 dd 0 3 mm 2 0 2 2 2 yyyy						2 0 2 2 <i>уууу</i>		
B.9 PPh Pasal 21 dibebaskan dari pemotongan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB). Pembebasan ini berdasarkan SKB.								
Nomor : Tanggal dd mmyyyy								
B.10 PPh Pasal 21 ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan :								
B.11 PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan :								
C. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK								
C.1 NPWP Instansi Pemerintah :		9 5 3 3 5 0 1 6 2 7 2 2 0 0 0						
	C.2 Nama Instansi Pemerintah : RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR						TIMUR	
	unit Organisasi	:						
C.4 Tanggal :		1 6 dd 0 3 mm	2 0 2 2 yyyy					
C.5 Nama Penandatangan :		HARI JUMADI						
C.6 Pernya	taan Wajib Pajak	:	Dengan ini saya menyatakan ba tandatangani secara elektronik.	ahwa bukti Pemotongan/Pemungu	tan Unifikasi telah sa	ya isi dengan	benar dan telah saya	
			Sesuai dengan ketentuan yang elektronik sehingga tidak diperli	berlaku, Direktorat Jenderal Pajak ukan tanda tangan.	t mengatur bahwa do	kumen ini tela	ah ditandatangani secara	